

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Dari hasil pengolahan data, analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab IV, maka simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya dan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh implementasi kebijakan pemerintah desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) terhadap efektivitas Program Kabupaten Bandung Pembangunan Fisik Desa Tanggulun Kabupaten Bandung dapat ditarik kesimpulan bahwa “hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata implementasi kebijakan yang didasarkan kepada pelaksanaan komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap pelaksana, dan struktur birokrasi ternyata berpengaruh secara positif pada efektivitas Pembangunan Fisik Desa Tanggulun Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung ”. Demikian pula “efektivitas Pembangunan Fisik Desa Tanggulun Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung secara keseluruhan berdasarkan hasil interval penilaian berada pada kondisi cukup baik.
2. Secara krusial variabel implementasi kebijakan pemerintah berpengaruh kuat terhadap efektivitas Pembangunan Fisik Desa Tanggulun Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung Dimana H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian hipotesis statistik yang diajukan teruji secara empirik. Jadi dalam penelitian ini pengaruh implementasi cukup (*Komunikasi, Sumber Daya,*

Disposisi/*Sikap Pelaksana*, dan *Struktur Birokrasi*) dimana berpengaruh terhadap efektivitas Pembangunan fisik desa. Sisanya terdapat faktor lainnya yang tidak diteliti selain implementasi kebijakan adalah pengendalian dan koordinasi.

5.2. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian maka saran-saran yang peneliti ajukan untuk pengembangan ilmu serta saran yang bersifat operasional berikut ini:

5.2.1. Saran Untuk Pengembangan Ilmu (Akademis) :

- a. Khususnya dalam Pembangunan nFisik Desa Tanggulun Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung masih menyisakan faktor lain untuk penelitian di bidang yang berbeda di luar implementasi kebijakan. Penelitian pada tinjauan implementasi kebijakan publik tentang Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPD) Tanggulun Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung merupakan variabel krusial untuk melengkapi model implementasi kebijakan, seperti program pemerintah dalam model *Top Down Approach* (pendekatan dari atas) tidak sekedar mengejar terpenuhinya nilai ekonomi bagi pemerintah daerah dan masyarakatnya, tetapi secara objektif memiliki nilai yang sempurna untuk mengoptimalkan program pembangunan fisik bagi kepentingan pembangunan saat ini dan pada masa yang akan datang.
- b. Penelitian lanjutan melalui variabel yang sama dengan menambah variabel lain

serta pendekatan lainnya yang ada sangkut pautnya dengan bidang kajian Ilmu Pemerintahan dalam program pembangunan fisik merupakan langkah penting dalam pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum, meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas serta pengembangan di daerah.

5.2.2. Saran Praktis (untuk implementasi kebijakan)

- a. Pemerintah, baik Kabupaten, Kecamatan, maupun Desa mampu bertindak sebagai inisiator dalam mengkomunikasikan program-program pembangunan fisik kepada masyarakat sehingga implementasinya lebih optimal, terutama melalui sosialisasi implementasi kegiatan program Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPD), rapat-rapat dan penyuluhan.
- b. Pemerintah desa Tanggulun Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung dituntut untuk segera mengoptimalkan usaha-usaha program pembangunan fisik secara seksama dan berkesinambungan terhadap kebutuhan masyarakat desa dengan memberikan pilihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat guna memenuhi sarana dan prasarana pendukung pembangunan.
- c. Sebaiknya Pemerintah desa maupun Pemerintah kecamatan berusaha bersikap lebih optimis, responsif, dan bersikap lebih loyal antar pegawai, serta memberikan penghargaan yang lebih

memadai terutama dalam mendukung kegiatan operasional program Rencana Kegiatan Pembangunan Fisik.

- d. Agar program pembangunan fisik desa lebih optimal dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, maka direkomendasikan adanya koordinasi antara pemerintah baik ditingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa, dengan masyarakat.